

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang terbentuknya BKRD tidak terlepas dari keinginan dan cita-cita masyarakat Jambi yang ingin daerah Jambi menjadi Propinsi sendiri terlepas dari lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Akan tetapi keinginan masyarakat Jambi untuk menjadikan daerah Jambi menjadi propinsi belum bersatu padu dalam satu suara, hal ini dikarenakan masih ada sebagian kecil pendapat yang bertolak belakang dengan hal tersebut seperti keinginan agar daerah Jambi tetap berada di bawah pemerintahan Sumatera Tengah dan ada juga masyarakat Jambi yang berkeinginan agar daerah Jambi masuk ke dalam Propinsi Sumatera Selatan. Sehingga keinginan masyarakat Jambi itu tidak terkoordinir dalam suatu wadah perjuangan. Dari sinilah timbul pendapat untuk menyatukan pandangan masyarakat Jambi dalam suatu wadah perjuangan yang jelas dan resmi. Suatu wadah perjuangan dibutuhkan untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat Jambi sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Puncaknya terjadi pada Kongres Rakyat Jambi yang berlangsung dari tanggal 14-18 Juni 1955, dimana hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah terbentuknya Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD). BKRD diharapkan mampu menjadi penampung aspirasi dan keinginan masyarakat Jambi mulai dari kalangan pemuda sampai tokoh-tokoh

masyarakat untuk memperjuangkan daerah Jambi menjadi Propinsi terlepas dari Sumatera Tengah dan berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat.

2. Peran BKRD dalam terbentuknya Propinsi Jambi dimulai dengan mengadakan sidang pleno pertama pada tanggal 14-15 Juli 1955, dalam sidang ini BKRD menetapkan delegasi yang akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan dan menjelaskan aspirasi rakyat Jambi yang menginginkan daerah Jambi menjadi propinsi. Kemudian Pemuda Jambi mengadakan kongres pada tanggal 3-5 Januari 1957. Kongres pemuda ini mengambil sikap dan keputusan antara lain mendesak BKRD untuk membentuk Dewan persiapan Propinsi Jambi dan segera memproklamasikan secara *de facto* Propinsi Jambi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957 serta memutuskan hubungan dengan Propinsi Sumatera Tengah dan berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat, jika BKRD tidak dapat bertanggung jawab atas tuntutan ini, maka kongres pemuda akan menentukan sikap tegas sesuai keadaan. Menanggapi tuntutan tersebut maka BKRD mengadakan sidang pleno pada tanggal 6 Januari untuk merealisasikan berdirinya Propinsi Jambi. Dalam sidang pleno ini BKRD menyatakan secara *de facto* daerah Keresidenan Jambi menjadi propinsi yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat
3. Proses pembentukan Propinsi Jambi yang dilakukan oleh BKRD menemui banyak halangan dan rintangan, meskipun pada tanggal 8 Februari 1957 diadakan upacara peresmian Propinsi Jambi, akan tetapi peresmian propinsi tersebut hanya diakui oleh Dewan Banteng dan Tentara Teritorial II Sriwijaya, yang mana secara hukum belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat belum mengeluarkan suatu ketetapan atau

undang-undang resmi tentang Propinsi Jambi. Banyak usaha yang telah dilakukan BKRD dan masyarakat Jambi agar realisasi Propinsi Jambi dapat terwujud, seperti melalui perundingan segitiga yang dapat dikatakan gagal untuk merealisasikan Propinsi Jambi agar memiliki Gubernur/Kepala Daerah serta mempunyai lembaga pemerintahan sendiri. Namun pada tanggal 1 Juli 1957 Kabinet Djuanda mengadakan sidang yang hasilnya adalah Propinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Propinsi Jambi. Keputusan Kabinet ini akhirnya memberikan landasan hukum yang kuat bagi realisasi Propinsi Jambi. Kabinet Djuanda pada tanggal 7 Agustus 1957 mengadakan sidang kabinet lagi, dalam sidang kali ini Kabinet menerima Rancangan Undang-undang Pembentukan Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi dalam bentuk undang-undang darurat, dua hari berselang tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1957 di Denpasar, Bali Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957. Hal ini membuat Propinsi Jambi secara hukum memiliki landasan yang kuat yakni pengakuan dari Pemerintah Pusat. Propinsi Jambi akhirnya diresmikan pada tanggal 30 Desember 1957 di Gedung Nasional oleh *Acting* Gubernur Propinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri. Keesokan harinya tanggal 31 Desember bertempat di beranda rumah kediaman Residen Jambi, para anggota DPRDP Propinsi Jambi dilantik dan diambil sumpahnya. Pelantikan anggota DPRDP Propinsi Jambi ini dilaksanakan oleh *Acting* Gubernur Propinsi Jambi Djamin Gelar Datuk Bagindo yang mewakili Menteri Dalam Negeri.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat di seluruh Indonesia khususnya masyarakat Jambi tentang sejarah terbentuknya Propinsi Jambi dan perjuangan BKRD sebagai wadah perjuangan rakyat Jambi dalam memperjuangkan agar daerah Jambi menjadi Propinsi.
2. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan bahan bacaan bagi peneliti yang ingin meneliti sejarah dari Propinsi Jambi.
3. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini maka dari itu penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal tersebut.